



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 13 Januari 2021/Periodik - 2020)

BIDANG : YUDIKATIF
LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG
UNIT KERJA : PENGADILAN TINGGI BANDUNG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **ESTER SIREGAR**
2. Jabatan : **HAKIM TINGGI**
3. NHK : **12327**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 10.499.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 93 m2/150 m2 di LABUHANBATU, WARISAN Rp. 550.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 1620 m2/130 m2 di MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 3.645.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 788 m2/400 m2 di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 6.304.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 355.000.000

1. MOBIL, MAZDA CX-5 MINIBUS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 170.000.000
2. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER MINIBUS Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 79.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. 8.750.000.000**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 536.680.984**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 20.219.680.984**III. HUTANG** Rp. ----**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 20.219.680.984

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.